



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19530);
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangli.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Lembaga Kearsipan Daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip statis dan pembinaan kearsipan.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan Pengguna Arsip yang berhak.
8. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
9. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan Daerah/negara, masyarakat dan perorangan.
10. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan Penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
15. Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
16. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan Pengguna Arsip yang berhak.
17. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
18. Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

19. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi Arsip dari penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menyediakan informasi Arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis; dan
- b. pengaturan akses Arsip.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan Arsip Dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Arsip yang tercipta pada instansi Pencipta Arsip dapat diklasifikasikan menjadi informasi Biasa, Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia;
 - b. keempat tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat Klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia;

- b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, daftar Arsip inaktif, daftar Arsip terjaga dan daftar Arsip vital;
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut :
- a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan;
 - f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian; dan
 - j. 900 Keuangan.

BAB III PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1) Pengaturan akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada Pengguna Arsip yang berhak.
- (2) Pengguna Arsip yang berhak mengakses Arsip terdiri dari :
 - a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. pengguna eksternal dari luar instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Perangkat Daerah/Instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada dibawah kewenangannya;
 - 2. Jabatan Administrator yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - 3. Jabatan Pengawas yaitu Kepala Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

- b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas Arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat Klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangli.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai berikut :

- a. Lampiran I kode angka 000 bidang tugas Umum;
- b. Lampiran II kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;
- c. Lampiran III kode angka 200 bidang tugas Politik;
- d. Lampiran IV kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;
- e. Lampiran V kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan;
- f. Lampiran VI kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
- g. Lampiran VII kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
- h. Lampiran VIII kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
- i. Lampiran IX kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian; dan
- j. Lampiran X kode angka 900 bidang tugas Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi Arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan Arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kategori Arsip Biasa/umum/Terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. kategori Arsip Terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan

- c. kategori Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi Arsip.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 12



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

I.	UMUM					
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang - Garuda - Bendera Kebangsaan - Lagu Kebangsaan - Lagu Daerah Provinsi - Lagu Daerah Kabupaten	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	002	Tanda Kehormatan/ Penghargaan - Bintang - Satya Lencana - Samkarya Nugraha - Monumen - Penghargaan Secara Adat - Penghargaan Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	003	Hari Raya/ Besar - Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb - Hari Raya Keagamaan - Hari Ulang Tahun (HUT) - Hari-hari Besar Nasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	004	Ucapan - Ucapan Terima kasih - Ucapan Selamat - Ucapan Belasungkawa - Ucapan Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	005	Undangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	006	Tanda Jabatan - Pamong Praja - Tanda Pengenal - Pejabat Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung Kantor/ Termasuk Instalasi Prasarana Fisik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	012	Rumah Dinas - Tanah Untuk Rumah Dinas - Perabot Rumah Dinas - Rumah Dinas Golongan 1 - Rumah Dinas Golongan 2 - Rumah Dinas Golongan 3 - Rumah/ Bangunan Lainnya - Rumah Pejabat Negara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	013	Mess/ Guest House	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun/ Apartemen	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	016	Telepon/Faximile/Internet	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	019	Protokol - Upacara Bendera - Tata Tempat - Pemasangan Gambar Presiden dan Wakil Presiden - Audiensi - Alamat-alamat Kantor dan Pejabat - Sambutan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	020	PERALATAN - Penawaran, Ekspose	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	021	Alat Tulis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	022	Mesin Kantor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	023	Perabot Kantor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	024	Alat Angkutan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	025	Pakaian Dinas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	026	Senjata	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	027	Pengadaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

4	030	KEKAYAAN DAERAH				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMEN TASI/KEARSIPAN/SANDI				
	041	Perpustakaan - Umum - Khusus - Perguruan Tinggi - Sekolah - Keliling	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi - Foto - Audio - Video	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	043	Internet	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	044	Fax	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	045	Kearsipan - Pola Klasifikasi - Penataan Berkas - Penyusutan Arsip - Pembinaan Kearsipan - Pemeliharaan/perawatan arsip - Pengawetan/ Fumigasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	046	Sandi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis

	047	Website	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
	048	Pengelolaan Data	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
	049	Jaringan Komunikasi Data	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
6	050	PERENCANAAN - RPJP - RPJMD - RENSTRA - RENJA	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sub. Bidang, Sub. Bagian
	051	Bidang Pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan dan Ketertiban	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Pengawasan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	059	Bidang Keuangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN				
	061	Organisasi Instansi Pemerintah - Susunan dan Tata Kerja - Tata Tertib Kantor, Jam Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	065	Ketatalaksanaan/ Tata Naskah/Sistem	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	072	Survey	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
9	080	KONFERENSI				
	081	Gubernur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	082	Bupati/ Walikota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	083	Komponen Eselon Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	084	Instansi Lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	085	Internasional di Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	086	Internasional di Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

II.	PEMERINTAHAN					
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	100	PEMERINTAHAN				
	102	Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	110	PEMERINTAHAN PUSAT				
	114	Kementerian Dalam Negeri - Amanat Menteri Dalam Negeri/ Sambutan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	115	Kementerian Lainnya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	116	Lembaga Tinggi Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	117	Lembaga Non Kementerian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	118	Otonomi/ Desentralisasi/ Dekonsentrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	119	Kerjasama Antar Kementerian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	120	PEMERINTAH PROVINSI				
	121	Gubernur				
		- Pencalonan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Pengangkatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Meninggal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	122	Wakil Gubernur				
		- Pencalonan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Meninggal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	123	Sekretaris Wilayah				
		- Pencalonan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Meninggal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	124	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembinaan/ Perubahan Nama Kepada : Daerah, kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut dan sebagainya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum Koordinasi Lainnya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	125	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembinaan/ Perubahan Nama Kepada : Daerah, kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut dan sebagainya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemindahan Ibukota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembagian Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

4	127	Penyerahan Urusan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	128	Swaparaja, Penataan Wilayah, Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	130	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA				
	131	Bupati/Walikota meliputi				
		- Pencalonan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Meninggal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Memori Kepala Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Sambutan/Pengarahan/ Amanat	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	132	Wakil Bupati/Walikota meliputi				
		- Pencalonan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Pelantikan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	133	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota meliputi				
		- Pencalonan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Meninggal	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Muspida	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum BAN (Badan Anggaran Nasional)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Forum Koordinasi lainnya	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Kabupaten/Kota	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	135	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Ibukota/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberian Dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	138	Pemerintah Wilayah Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sambutan/Pengarahan/ Amanat	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				

	141	Pamong Desa, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa/Kelurahan, Dewan Marga, Rembug Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa/Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	146	Kewilayahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Nama Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Desa/kelurahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa, jangan klasifikasikan di sini, lihat 410	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	148	Perangkat Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kepala Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sekretaris Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Staf Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	149	Dewan Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Tetangga	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Warga	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Kampung	Biasa/ Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	150	LEGISLATIF MPR/ DPR/ DPD				
	152	Persidangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	153	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	154	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	155	Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	156	Persidangan Sidang Pleno Dengar Pendapat/ Rapat Komisi Reses	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	157	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	158	Jawaban Pemerintah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	159	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
7	160	DPRD PROVINSI				
	161	Keanggotaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Meninggal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	162	Persidangan - Reses	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	163	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	164	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	165	Sekretaris DPRD Provinsi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	170	DPRD KABUPATEN/KOTA				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	172	Persidangan - Reses	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
9	180	HUKUM				
		Konstitusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Dasar hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Undang Undang Dasar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		GBHN	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	181	Perdata	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Tanah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rumah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Utang/Piutang	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Gadai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Hipotik	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Notariat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	182	Pidana	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	183	Peradilan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Bantuan hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	184	Hukum Internasional	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	185	Imigrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Visa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pasport	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Exit	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Reentry	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Lintas Batas/Batas antar Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	186	Kepenjaraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	187	Kejaksaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	188	Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Undang-undang Dasar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Pemerintah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Lembaga Non Departemen	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Peraturan Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Provinsi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Kabupaten/ Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keputusan Lembaga Non Departemen	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keputusan Gubernur	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keputusan Bupati/ Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Instruksi Lembaga Non Departemen	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Instruksi Gubernur	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Instruksi Bupati/ Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	189	Hukum Adat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
10		Tokoh Adat/ Masyarakat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
	191	Perwakilan Asing	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	192	Tamu Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	193	Kerjasama dengan Negara Asing - ASEAN - Bantuan Luar Negeri/ Hibah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	194	Perwakilan RI di Luar Negeri/ Hibah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
--	-----	-------------------------------------	----------	-------------	---	---------------

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

III.	POLITIK					
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	200	POLITIK				
	201 203 204	- Kebijakan Umum - Orde Baru - Reformasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	210	KEPARTAIAN Meliputi : Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian,dan Pembubaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	211 212	- Lambang Partai - Kartu Tanda Anggota - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	213	- Bantuan Keuangan Parpol - Rapat Koordinasi konsolidasi partai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

2	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	- Berdasarkan Perjuangan - Berkas tentang Perjuangan Perintis Kemerdekaan - Berkas tentang Perjuangan Angkatan 45 - Berkas tentang Perjuangan Veteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	222	- Berdasarkan Kekaryaan - Kekaryaan PEPABRI - Kekaryaan Wredatama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	223	- Berdasarkan Kerohanian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	224	- Lembaga Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	225	- Lembaga Swadaya Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

3	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	- Ikatan Dokter Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	232	- Persatuan Guru Republik Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	233	- Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	234	- Persatuan Advokat Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	235	- Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	236	- Korps Pegawai Republik Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	237	- Persatuan Wartawan Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	238	- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	239	- Organisasi Profesi dan fungsional lainnya - Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) - Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	240	ORGANISASI PEMUDA				
	241	- Komite Nasional Pemuda Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	242	- Organisasi Mahasiswa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	243	- Organisasi Pelajar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	244	- Gerakan Pemuda Ansor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	245	- Gerakan Pemuda Islam Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	246	- Gerakan Pemuda Marhaenis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN				
	251	- Federasi Buruh Seluruh Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	252	- Organisasi Buruh Internasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	253	- Himpunan Kerukunan Tani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	254	- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	255	- Keluarga Sopir Proporsional Indonesia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	260	ORGANISASI WANITA				
	261	- Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	262	- Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	263	- Pemberdayaan Perempuan (Wanita)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	264	- Konggres Wanita	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

7	270	PEMILIHAN UMUM				
	271	- Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	272	- Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	273	- Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	274	- Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	275	- Pemilih / Daftar Pemilih	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	276	- S a r a n a - Sarana T P S - Sarana kendaraan - Surat suara - Kotak suara - Dana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	277	- Pemungutan suara / Penghitungan suara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	278	- Penetapan Hasil Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	279	- Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	280	Pengucapan Sumpah Janji MPR, DPR, DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

IV.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN/KETERTIBAN				
	301	- Keamanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	- Ketertiban	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN				
	311	- Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang, Seksi, SuBag
	312	- Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis

	313	- Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	314	- Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
3	320	KEMILITERAN				
	321	- Latihan Militer	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	322	- Wajib Militer	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	323	- Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	324	- Kekayaan TNI, Pejabat Sipil dari TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331	- Kepolisian - Polisi Pamong Praja - Kamra - Kamling - Jaga Wana	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis

	332	- Huru hara/ Demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	333	- Senjata Api/ Tajam	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	334	- Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	335	- Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	336	- Surat-Surat Kaleng	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	337	- Pengaduan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan Bidang Teknis tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	338	- Himbauan / Larangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan Bidang Teknis tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	339	- Teroris	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	- Perlindungan Sipil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN				
	351	- Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	352	- Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	353	- Penganiayaan, pencurian dan perampasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	354	- Subversi/ Penyelundupan/ Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis

	355	- Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	356	- Korupsi/Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan/ KKN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	357	- Pemerkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	358	- Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	359	- Kejahatan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	360	BENCANA				
	361	- Gunung Berapi/ Gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	362	- Banjir / Tanah Longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	363	- Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

8	364	Kebakaran - Pemadam Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	365	- Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	366	- Tsunami	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	370	- KECELAKAAN SAR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	371	- Darat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	372	- Udara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	373	- Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	374	- Sungai/ Danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT						
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	402	PNPM Mandiri Pedesaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN DESA/KELUARAHAAN				
	411	PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG				
		a Swadaya Gotong Royong 1) Penataan Gotong Royong 2) Gotong Royong Dinamis 3) Gotong Royong Statis 4) Pungutan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b Lembaga Sosial Desa (LSD) 1) Pembinaan 2) Klasifikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		3) Proyek 4) Musyawarah				
		c Latihan Kerja Masyarakat 1) Kader Masyarakat 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3) Pusat Latihan 4) Kursus-Kursus 5) Kurikulum/Syllabus 6) Keterampilan 7) Pramuka	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1) Program 2) Pembinaan Organisasi 3) Kegiatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e Penyuluhan 1) Publikasi 2) Peragaan 3) Sosio Drama 4) Siaran Pedesaan 5) Penyuluhan Lapangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f Kelembagaan Desa 1) Kelompok Tani 2) Rukun Tani 3) Subak 4) Dharma Tirta	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	412	PEREKONOMIAN DESA				
		a Produksi Desa 1) Pengolahan 2) Pemasaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		b Keuangan Desa 1) Perkreditan Desa 2) Inventarisasi Data 3) Perkembangan/ Pelaksanaan 4) Bantuan/Stimulans 5) Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c Koperasi Desa 1) Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 2) Koperasi Usaha Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d Penataan Bantuan Pembangunan Desa 1) Jumlah Desa yang diberi Bantuan 2) Pengarahan 3) Pusat 4) Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e Alokasi Bantuan Pembangunan Desa 1) Pusat 2) Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa 1) Bantuan Langsung 2) Bantuan Keserasian 3) Bantuan Juara Lomba Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	413	PRASARANA DESA				
		a Prasarana Desa 1) Pembinaan 2) Bimbingan Teknis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b Pemukiman Kembali Penduduk 1) Lokasi 2) Diskusi 3) Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c Masyarakat Pradesa 1) Pembinaan 2) Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa 1) Rumah Sehat 2) Proyek Perintis 3) Pelaksanaan 4) Pengembangan 5) Perbaikan Kampung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	414	PENGEMBANGAN DESA				
		a Tingkat Perkembangan Desa 1) Jumlah Desa 2) Pemekaran Desa 3) Pembentukan Desa Baru 4) Evaluasi 5) Bagan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP) 1) Penyuluhan Program 2) Lokasi UDKP	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		3) Pelaksanaan 4) Bimbingan/Pembinaan 5) Evaluasi				
		c Tata Desa 1) Inventarisasi 2) Penyusunan Pola Tata Desa 3) Aplikasi Tata Desa 4) Pemetaan 5) Pedoman Pelaksanaan 6) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d Perlombaan Desa 1) Pedoman 2) Penilaian 3) Kejuaraan 4) Piagam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	415	KOORDINASI				
		a Sektor Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang Koordinasi Sektor Khusus di Pemerintah Kabupaten Bangli				
		b Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang Rapat Koordinasi Horizontal dengan Lembaga di Lingkungan Internal dan Eksternal Pemerintah Kabupaten Bangli				

		c Tim Koordinasi Pusat (TKP)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang Tim Koordinasi Pusat				
		d Kerjasama 1) Luar Negeri (UNICEF) 2) Perguruan Tinggi 3) Kementerian/ Lembaga Non Kementerian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
3	420	PENDIDIKAN				
	421	SEKOLAH				
		a Pra Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b Sekolah Dasar/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c Sekolah Menengah/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d Sekolah Tinggi/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e Sekolah Kejuruan/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g Kegiatan Pelajar 1) Reuni, Darmawisata, 2) Organisasi Siswa Intra	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		Sekolah (OSIS), 3) Pelajar Teladan, dan 4) Resimen Mahasiswa (MENWA)				
		h Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		i Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	422	ADMINISTRASI SEKOLAH				
		a Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b Tahun Pelajaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c Hari Libur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d Uang Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e Beasiswa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	423	METODE BELAJAR				
		a Kuliah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		b Ceramah, Simposium	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c Diskusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tour	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e Kurikulum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f Karya Tulis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g Ujian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	424	TENAGA PENGAJAR Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rektor dan guru teladan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	425	SARANA PENDIDIKAN				
		a Gedung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Gedung Sekolah 2) Kampus 3) Pusat Kegiatan Mahasiswa				

		b Buku	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang buku pelajaran dan diktat kuliah				
		c Perlengkapan Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang perlengkapan sekolah				
	426	KEOLAHRAGAAN				
		a Cabang Olahraga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Gedung Olahraga 2) Stadion 3) Lapangan 4) Kolam Renang				
		c Pesta Olahraga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d KONI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	427	KEPEMUDAAN Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelanggang remaja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	428	KEPRAMUKAAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	429	PENDIDIKAN KEDINASAN DEPDAGRI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
4	430	KEBUDAYAAN				
	431	KESENIAN				
		a Cabang Kesenian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang gedung kesenian				
	432	KEPURBAKALAN				
		a Museum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b Peninggalan Kuno	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Candi, termasuk Pemugaran 2) Benda Peninggalan Kuno				
	433	SEJARAH	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	434	BAHASA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	435	USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang usaha pertunjukan, hiburan, dan kesenangan				

	436	KEPERCAYAAN Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
5	440	KESEHATAN				
	441	PEMBINAAN KESEHATAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a Gizi				
		b Mata				
		c Jiwa				
		d Kanker				
		e Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)				
		f Perawatan				
		g Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)				
		h Pekan Imunisasi Nasional				
	442	OBAT-OBATAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a Pengadaan b Penyimpanan				
	443	PENYAKIT MENULAR				
		a Pencegahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kusta 2) Kelamin 3) Frambosia 4) TBC/AIDS/HIV				

		c Epidemiologi dan Karantina (Epidka)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kholera 2) Imunisasi 3) Surveilense 4) Rabies/Anjing Gila, Antraks				
		d Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Malaria 2) Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF) 3) Filaria 4) Serangga				
		e Hygiene Sanitasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TPPMM) 2) Sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga) 3) Pestisida				
	444	GINI				
		a Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan, Busung Lapar b Keracunan Makanan c Menu Makanan Rakyat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		d Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) e Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)				
	445	RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, POLIKLINIK, POSYANDU	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	446	TENAGA MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	447	ALAT MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	448	PENGobatan TRADISIONAL	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a Pijat b Tusuk jarum c Jamu tradisional/herbal d Dukun/paranormal				
6	450	AGAMA				
	451	ISLAM				
		a Peribadatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Sholat 2) Zakat, Fitrah 3) Puasa 4) MTQ				
		b Rumah Ibadah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	c Tokoh Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Tinggi 2) Menengah 3) Dasar 4) Pondok Pesantren 5) Gedung Sekolah 6) Tenaga Pengajar 7) Buku 8) Dakwah 9) Organisasi/Lembaga Pendidikan 10) TPA/TQA/TPQ				
	e Harta Agama, Baitulmal, dsb	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	f Peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	g Organisasi Keagamaan Bukan Politik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang Majelis Ulama Indonesia				
	h Mazhab	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	452	KRISTEN PROTESTAN				
		a Peribadatan b Rumah Ibadah c Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine d Mazhab e Organisasi Gerejani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	453	KATHOLIK				
		a Peribadatan b Rumah Ibadah c Tokoh Agama, Rohaniawan, Pastor d Mazhab e Organisasi Gerejani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	454	HINDU				
		a Peribadatan b Rumah Ibadah c Tokoh Agama, Rohaniawan d Mazhab e Organisasi Keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	455	BUDHA				
		a Peribadatan b Rumah Ibadah c Tokoh Agama, Rohaniawan d Mazhab e Organisasi Keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	456	URUSAN HAJI				
		a ONH b Umroh c Manasik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

7	460	SOSIAL				
	461	REHABILITASI PENDERITA CACAT	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a Cacat Mata b Cacat Tubuh c Cacat Mental d Bisu Tuli				
	462	TUNA SOSIAL	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a Gelandangan b Pengemis c Tuna Susila d Anak Nakal/Anak Jalanan				
	463	KESEJAHTERAAN ANAK/ KELUARGA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a Anak Putus Sekolah b Ibu Teladan c Keluarga Sakinah d Anak Asuh				
	464	PEMBINAAN PAHLAWAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a Pahlawan b Perintis Kemerdekaan c Cacat Veteran				
	465	KESEJAHTERAAN SOSIAL	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a Lanjut Usia b Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi				
	466	SUMBANGAN SOSIAL	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a Korban Bencana b Pencarian Dana untuk Sumbangan c Panti Asuhan d Panti Jompo				

	467	BIMBINGAN SOSIAL	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang bimbingan, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman untuk masyarakat suku terasing				
	468	PMI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	469	MAKAM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
a Umum b Pahlawan c Khusus Keluarga Raja d Krematorium						
8	470	KEPENDUDUKAN				
	471	PENDAFTARAN PENDUDUK				
		a Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Biodata 2) Nomor Induk Kependudukan 3) Kartu Tanda Penduduk 4) Kartu Keluarga 5) Advokasi Identitas Penduduk				
		b Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perpindahan penduduk WNI 2) Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia				

		3) Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara 4) Daerah Terbelakang 5) Bedol Desa				
		c Perpindahan Penduduk Antar Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Penduduk Indonesia ke Luar Negeri 2) Orang Asing tinggal sementara 3) Orang Asing tinggal tetap 4) Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar Negara (pelintas batas tradisional)				
		d Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Akibat Bencana Alam 2) Akibat Kerusakan Sosial 3) Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang 4) Pendaftaran Penduduk Rentan				
	472	PENCATATAN SIPIL				
		a Kelahiran, Kematian, dan Advokasi 1) Kelahiran 2) Kematian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		3) Advokasi Kelahiran dan Kematian				
		b Perkawinan, Perceraian dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perkawinan Agama Islam 2) Perkawinan Agama Non Islam 3) Perceraian Agama Islam 4) Perceraian Agama Non Islam 5) Advokasi Perkawinan dan Perceraian				
		c Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi Pengangkatan Anak 1) Pengangkatan anak 2) Pengakuan anak 3) Pengesahan anak 4) Perubahan akta 5) Pembatalan akta 6) Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dna pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		d Pencatatan Kewarganegaraan 1) Akibat perkawinan 2) Akibat kelahiran 3) Non perkawinan 4) Non kelahiran 5) Perubahan WNI ke WNA	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	473	INFORMASI KEPENDUDUKAN				
		a Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perangkat keras 2) Perangkat lunak 3) Jaringan komunikasi data				
		b Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Daerah maju 2) Daerah berkembang 3) Daerah terbelakang				
		c Pengolahan Data Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pendaftaran penduduk 2) Kejadian vital penduduk 3) Penduduk non registrasi				
		d Pelayanan Informasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Media elektronik 2) Media cetak 3) Outlet				

474	PERKEMBANGAN PENDUDUK				
	a Pengarahan Kuantitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Struktur jumlah 2) Komposisi 3) Fertilitas 4) Kesehatan reproduksi 5) Morbiditas penduduk 6) Mortalitas penduduk				
	b Pengembangan Kuantitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Anak dan remaja 2) Penduduk usia produktif 3) Penduduk lanjut usia 4) Gender				
	c Penataan Persebaran Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Migrasi antar wilayah 2) Migrasi internasional 3) Urbanisasi 4) Sementara 5) Migrasi non permanen				
	d Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) Pelayanan kelembagaan ekonomi 3) Pelayanan kelembagaan sosial budaya				

		4) Partisipasi masyarakat				
		e Pengembangan Wawasan Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pendidikan jalur sekolah 2) Pendidikan jalur luar sekolah 3) Pendidikan jalur masyarakat 4) Pembangunan berwawasan kependudukan				
	475	PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN				
		a Indikator Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan 2) Pemanfaatan indikator kependudukan 3) Sosialisasi indikator kependudukan				
		b Proyeksi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2) Pemanfaatan proyeksi kependudukan				

		c Analisis Dampak Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2) Pemanfaatan analisis dampak kependudukan				
		d Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Lembaga internasional, 2) Lembaga masyarakat dan nirlaba, 3) Lembaga usaha swasta				
		e Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Lembaga pemerintah 2) Pemerintah provinsi dan kota 3) Pemerintah kabupaten				
		f Analisis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan				
	476	MONITORING	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	477	EVALUASI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	478	DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	479	KELUARGA BERENCANA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
9	480	MEDIA MASSA				
	481	PENERBITAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Surat kabar 2) Majalah 3) Buku 4) Penerjemahan 5) Buletin 6) Jurnal 7) Kliping				
	482	RADIO	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) RRI 2) Non RRI 3) Radio luar negeri 4) Radio internet				
	483	TELEVISI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) TVRI 2) Swasta lokal, nasional, 3) Luar negeri 4) Televisi internet				
	484	FILM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	485	PERS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kewartawanan, 2) Wawancara 3) Informasi nasional				
	486	GRAFIKA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang grafika/cetak buku				

	487	PENERANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang pameran non komersil				
	488	OPERATION ROOM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang operation room terkait media massa				
	489	HUBUNGAN MASYARAKAT	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media massa				
10	490	PENGADUAN MASYARAKAT	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

VI.	PEREKONOMIAN					
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	500	PEREKONOMIAN - Dewan Stabilisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	501	PENGADAAN PANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	502	PENGADAAN SANDANG	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
2	510	PERDAGANGAN / TATANIAGA				
		Promosi Perdagangan - Pekan Raya - Iklan - Pameran Non komersil - Pelelangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Tera/Timbang				
	511	Pemasaran - Sembilan Bahan Pokok - Pasar - Pertokoan, Kaki Lima, Kios	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	512	EKSPOR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	513	IMPOR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	514	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	515	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	516	PERGUDANGAN; TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK GORENG	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	517	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	518	KOPERASI (UNTUK BUUD, KUD, KUR)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	520	PERTANIAN				
	521	Tanaman Pangan				
		a Program - Bimas/Inmas termasuk kredit - Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		b Produksi - Padi/Panen - Palawija	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Jagung - Ketela Pohon/Ubi-ubian - Hortikultura - Sayuran/Buah-buahan - Tanaman Hias - Pembudidayaan Rumput Laut				
	c	Saran Usaha Pertanian - Peralatan - Pembibitan - Pupuk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	d	Perlindungan Tanaman - Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang - Hama-hama serangga, wereng, Walang sangit, tungro, hama tikus dan sejenisnya - Pemberantasan hama, meliputi : penyemprotan, penyiangan, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara - Pestisida	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	e	Tanah Pertanian Pangan - Persawahan - Perladangan - Kebun - Rumpun Ikan Laut - KTA/Lahan Kritis	Biasa/ Terbuka Biasa/ Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis Bidang Teknis

		f Pengusaha Petani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		g Bina Usaha - Pasca Panen - Pemasaran Hasil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	522	Kehutanan				
		a Program - Hak Pengusahaan Hutan - Tata Guna Hutan - Perpetaan Hutan - Tumpangsari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
		b Produksi - Kayu - Non Kayu	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		c Sarana Usaha Kehutanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		d Penghijauan, Reboisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		e Kelestarian - Cagar Alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa - Berburu, meliputi larangan dan izin berburu - Kebun Binatang - Konservasi Lahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		f Penyakit/Hama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		g Jenis-jenis Hutan - Hutan Hidup - Hutan Wisata - Hutan Produksi - Hutan Lindung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	523	Perikanan - Program - Penyuluhan - Teknologi - Produksi - Pelelangan - Usaha Perikanan - Pembibitan - Daerah Penangkapan - Pertambakan, meliputi : tambak ikan deras, tambak udang dan lain-lain - Jaring Terapung - Sarana - Peralatan - Kapal - Pelabuhan - Pengusaha - Nelayan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	524	Peternakan - Produksi - Susu ternak rakyat - Telur - Daging - Kulit - Sarana Usaha Ternak	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Pembibitan - Kandang ternak - Kesehatan Hewan - Penyakit Hewan - Pos Kesehatan Hewan - Tesi Pullorum - Karantina - Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk upaya pencegahannya - Perunggasan - Pengembangan Ternak - Inseminasi Buatan - Pembibitan/Bibit Unggul - Penyebaran Ternak - Makanan Ternak - Tempat Pemotongan Hewan - Data Peternakan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	525	Perkebunan - Program - Produksi - Karet - Teh - Tembakau - Tebu - Cengkeh - Kopra - Kopi - Cokelat - Aneka Tanaman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

4	530	Perindustrian - Undang-undang Gangguan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	531	Industri Logam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	532	Industri Mesin/Elektronik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	533	Industri Kimia/Farmasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	534	Industri Tekstil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	535	Industri Makanan/Minuman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	536	Aneka Industri/Perusahaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	537	Aneka Kerajinan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	538	Usaha Negara/BUMN - Perusahaan Jawatan - Perusahaan Umum - Persero/PT, CV, UD, Firma	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	539	Perusahaan Daerah/BUMD/ BULD	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	540	PERTAMBANGAN/ KESAMUDERAAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	541	Minyak Bumi/ Bensin - Pengusahaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	542	Gas Bumi - Eksploitasi/Pengeboran - Kontrak Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Pengolahan, Meliputi : Tangki, Pompa Tanker				
	543	Aneka Tambang - Timah - Aluminium, Boxit - Besi, termasuk besi tua - Tembaga - Batu Bara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	544	Logam Mulia, Emas, Intan, Perak	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	545	Logam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	546	Geologi - Vulkanologi - Pengawasan Gunung Berapi - Sumur Artesis, air Bawah Tanah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	547	Hidrologi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	548	Kesamuderaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	550	PERHUBUNGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	551	Perhubungan Darat - Lalulintas Jalan Raya, Sungai, Danau - Keamanan Lalu-lintas, rambu-rambu - Angkutan Jalan Raya (Perizinan, Terminal, Alat Angkutan)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- Angkutan Sungai (Perizinan, Terminal, Pelabuhan) - Angkutan Danau (Perizinan, Terminal, Pelabuhan) - Feri (Perizinan, Terminal, Pelabuhan) - Perkeretaapian				
	552	Perhubungan Laut - Lalu lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum - Perkapalan Alat Angkutan - Pelabuhan - Pengerukan - Penjagaan Pantai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	553	Perhubungan Udara - Lalu Lintas Udara/ Keamanan Lalu Lintas Udara - Pelabuhan Udara - Alat Angkutan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	554	Pos	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	555	Telekomunikasi - Telepon, HT - Telegram - Telex/SSB, Faximile - Satelit, Internet - Stasiun Bumi, Parabola - Menara Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	556	Pariwisata dan Rekreasi - Obyek Kepariwisata - Perhotelan - Travel Service - Tempat Rekreasi - Tempat sejarah/monumen	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	557	Meteorologi - Ramalan Cuaca - Curah Hujan - Kemarau Panjang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
7	560	TENAGA KERJA				
	560	Tenaga Kerja - Pengangguran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	561	Upah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	562	Penempatan Tenaga Kerja, TKI - Outsourcing	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	563	Latihan Kerja, Magang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	564	Tenaga Kerja - BUTSI - Padat Karya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	565	Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	566	Keselamatan Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	567	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	568	Kesejahteraan Buruh (Kesehatan, Perumahan, dll.)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	569	Tenaga Orang Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
8	570	PERMODALAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	571	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	572	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan (Joint Venture)/ Penyertaan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	576	Belanja Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	577	Modal Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
9	580	Perbankan/Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	582	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	583	Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	584	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	585	Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	586	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	587	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	588	Hutang Negara, Obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	589	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
10	590	Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	591	Tata Guna Tanah - Pemetaan dan Pengukuran - Perpetaan - Penyediaan Data - Fatwa Tata Guna Tanah - Tanah Kritis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	592	Landreform - Redistribusi - Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan - Penentuan Tanah Obyek Landreform - Pembagian Tanah Obyek Landreform - Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform Ganti Rugi - Ganti Rugi Tanah Kelebihan, meliputi Sengketa ganti rugi tanah kelebihan tanah - Ganti Rugi Tanah Absentee, meliputi Sengketa ganti rugi tanah absentee - Ganti Rugi Tanah Partikelir, meliputi Sengketa ganti rugi tanah partikelir Bagi Hasil - Penetapan Imbangan Bagi Hasil - Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil - Sengketa Perjanjian Bagi Hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
--	-----	---	----------	------------	---	---------------

		Gadai Tanah - Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan - Pelaksanaan Gadai Tanah - Sengketa Gadai Tanah - Bimbingan dan Penyuluhan - Pengembangan - Yayasan Dana Landreform (YDL)				
	593	Pengurusan Hak-hak Tanah - Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis Sewa Tanah - Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu; tebu, tembakau, rosella, corchorus Hak Milik - Perorangan - Badan Hukum - Hak Pakai - Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) - Perseorangan, WNA Badan Hukum - Badan Hukum Indonesia - Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat - Kantor Dagang Asing - Tanah Gedung-gedung Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

		Guna Usaha - Perkebunan Besar - Perkebunan Rakyat - Peternakan - Perikanan - Kehutanan Hak Guna Bangunan - Perorangan - Badan Hukum - P3MB (Panitia Penguasaan Milik Belanda) - Badan Hukum Asing Belanda-PRK No.5/65 - Pemulihan Hak (PerPres 4/1960) Hak Pengelolaan - PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate - Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan Sengketa Tanah - Peradilan Perkara Tanah (lihat klasifikasi 183) - Pencabutan dan Pembebasan Tanah - Pencabutan Hak Pembebasan Tanah - Ganti Rugi Tanah				
--	--	---	--	--	--	--

	594	Pendaftaran Tanah - Pengukuran/Pemetaan - Fotogrametri - Terristis - Triangulasi - Peralatan - Dana Pengukuran (PerMen Agraria No.6/1965) - Sertifikat - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	595	Lahan Transmigrasi (Tata Guna Tanah, Landreform, Pengurusan Hak-hak Tanah, Pendaftaran Tanah)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN						
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Tata Bangunan Konstruksi, dan Industri Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	602	Kontraktor Pemborong - Tender / lelang - Penunjukan langsung - Prakuifikasi • Daftar Rekanan Mampu (DRM) • Tanda Daftar Rekanan (TDR)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	603	Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan - Tanah dan batu - Aspal, Aspal buatan, Aspal alam - Besi dan logam lainnya • Besi beton • Besi profil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		• Paku • Alumunium, profil - Bahan-bahan pelindung dan pengawet - Semen - Kayu seperti balok, papan, dolken - Bahan penutup atap - Alat-alat penggantung dan pengunci - Bahan-bahan bangunan lainnya				
	605	Instalasi - Instalasi bangunan - Instalasi listrik - Instalasi air sanitasi - Instalasi pengatur udara - Instalasi akustik - Instalasi cahaya/ penerangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	606	Konstruksi Pencegahan - Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran - Konstruksi pencegahan terhadap gempa - Konstruksi pencegahan terhadap angin udara - Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan - Konstruksi pencegahan terhadap gas/explosive	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Konstruksi pencegahan terhadap serangga - Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom				
2	610	Pengairan				
	611	Irigasi - Bangunan waduk • Bendungan • Tanggul • Pelimpahan banjir • Menara pengambilan - Bangunan pengambilan • Bendungan • Bendungan dengan pintu bilas • Bendungan dengan pompa • Pengambilan bebas • Pengambilan bebas dengan pompa • Sumur dengan pompa • Kantong lumpur • Slit ekstraktor • Escape Channel - Bangunan pembawa • Saluran • Bangunan • Box Tersier • Got miring • Talang • Syphon	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		• Gorong-gorong • Pelimpah samping - Bangunan Pembuang • Saluran • Bangunan • Gorong-gorong pembuang • Talang pembuang • Syphon pembuang - Bangunan lainnya • Jalan • Jembatan • Tangga cuci • Kubangan kerbau • Waduk lapangan • Bangunan penunjang • Jaringan telepon - Stasiun agro				
	612	Folder: - Tanggul keliling • Tanggul • Bangunan penutup sungai • Jembatan - Bangunan pembawa • Saluran • Stasiun pompa pemasukan • Bangunan bagi • Gorong-gorong • Syphon	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Bangunan pembuang • Stasiun pompa pembuang • Saluran • Pintu air pembuangan • Gorong-gorong pembuangan • Syphon pembuangan - Bangunan lainnya • Bangunan • Rumah petugas eksploitasi				
	613	Pasang Surut - Bangunan pembawa • Saluran • Bangunan pintu pemasukan - Bangunan pembuang • Saluran • Bangunan pintu pembuang - Bangunan lainnya • Kolam pasang • Saluran • Bangunan • Jalan • Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	614	Pengendalian Sungai - Bangunan pengaman • Tanggul banjir • Pintu pengatur banjir	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		• Klep pengatur banjir • Tembok pengaman talud • Krib • Kantung lumpur • Chek-dam • Syphon - Saluran pengaman • Saluran banjir • Saluran drainage • Corepure - Bangunan lainnya • Warning system • Stasiun				
	615	Pengamanan Pantai - Tanggul - Krib - Bangunan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	616	Air Tanah - Stasiun pompa - Bangunan pembawa - Bangunan pembuang - Bangunan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
3	620	Jalan				
	621	Jalan Kota - Daerah penguasaan • Tanah • Tanaman • Bangunan - Bangunan sementara • Jalan sementara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		• Jembatan sementara • Kantor proyek • Gudang proyek • Barak kerja • Laboratorium lapangan • Rumah - Badan jalan • Pekerjaan tanah • Stabilitas - Perkerasan • Lapis pondasi bawah • Lapis pondasi • Lapis permukaan - Drainage • Parit tanah • Gorong-gorong - Buku Trotuir • Tanah • Perkerasan • Pasangan - Median • Tanah • Tanaman • Perkerasan • Pasangan - Daerah samping • Tanaman • Pagar				
--	--	--	--	--	--	--

		- Bangunan pelengkap dan pengamanan • Rambu-rambu/ tanda lalu lintas • Lampu penerangan • Lampu pengatur lalu lintas • Patok-patok KM • Patok-patok ROW (Sempadan) • Rel pengamanan • Pagar • Turap, penahan • Bronjong				
	622	Jalan Luar Kota - Daerah penguasaan • Tanah • Tanaman • Bangunan - Bangunan sementara • Jalan sementara • Jembatan sementara • Kantor proyek • Gudang proyek • Barak kerja • Laboratorium lapangan • Rumah - Badan jalan • Pekerjaan tanah • Stabilisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Perkerasan • Lapis pondasi • Lapis pondasi bawah • Lapis permukaan - Drainage • Parit • Gorong-gorong • Sub drainage - Trotoar • Tanah • Perkerasan - Median • Tanah • Tanaman • Perkerasan • Pasangan - Daerah samping • Tanaman • Pagar - Bangunan perlengkap dam pengaman • Rambu-rambu / Tanda lalu lintas • Lampu penerangan • Lampu lalu lintas • Patok-patok KM • Patok-patok ROW • Rel-rel pengaman • Pagar • Turap pengaman • Bronjong				
--	--	---	--	--	--	--

4	630	Jembatan				
	631	Jembatan pada Jalan Kota - Daerah penguasaan • Tanah • Tanaman • Bangunan - Bangunan sementara • Jalan sementara • Jembatan sementara • Kantor proyek • Gudang proyek • Barak kerja • Laboratorium lapangan • Rumah - Pekerjaan tanah • Galian tanah • Timbunan tanah - Pondasi • Pondasi kepala jalan • Pondasi pilar • Angker - Bangunan bawah • Kepala jembatan • Pilar • Piloan • Landasan - Bangunan • Gelagar • Lantai • Perkerasan • Jalan orang/Trotoar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		• Sandaran • Talang air - Bangunan/pengaman • Turap/penahan • Bronjong • Strek dam • Kist dam • Corepure • Krib - Bangunan pelengkap • Rambu-rambu / Tanda lalu lintas • Lampu penerangan • Lampu lalu lintas • Patok-patok KM • Patok-patok ROW • Rel-rel pengaman • Pagar - Oprit • Badan • Perkerasan • Drainage • Baku • Median				
	632	Jembatan pada Jalan Luar Kota - Daerah penguasaan • Tanah • Tanaman • Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Bangunan sementara • Jalan sementara • Jembatan sementara • Kantor proyek • Gudang proyek • Barak kerja • Laboratorium lapangan • Rumah - Pekerjaan tanah • Galian tanah • Timbunan tanah - Pondasi • Pondasi kepala jalan • Pondasi pilar • Pondasi Angker - Bangunan bawah • Kepala jembatan • Pilar • Piloan • Landasan - Bangunan atas • Gelagar • Lantai • Perkerasan • Jalan orang/Trotoar • Sandaran • Talang air - Bangunan pengaman • Turap/penahan • Bronjong • Strek dam				
--	--	---	--	--	--	--

		• Kist dam • Corepure • Krib - Bangunan pelengkap • Rambu-rambu / Tanda lalu lintas • Lampu penerangan • Lampu lalu lintas • Patok-patok KM • Patok-patok ROW • Rel-rel pengaman • Pagar - Oprit • Badan • Perkerasan • Drainage • Baku • Median				
5	640	Bangunan Pemerintah - Gedung pengadilan - Rumah pejabat Negara - Gedung DPR - Gedung Balai kota - Penjara - Perkantoran - Rumah Dinas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	642	Bangunan Pendidikan - Taman kanak-kanak - SD dan Sekolah Menengah - Perguruan Tinggi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Tempat Kursus/Lembaga Pendidikan - Tempat Diklat				
	643	Bangunan Rekreasi - Bangunan Olah Raga - Gedung Kesenian - Gedung Pemancar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	644	Bangunan Perdagangan - Pusat Perbelanjaan (Pasar, Mall, Supermarket, dept.Store) - Gedung Perdagangan - Bank - Perkantoran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	645	Bangunan Pelayanan Umum - Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum - Gedung Parkir - Rumah Sakit / Puskesmas - Gedung Telkom - Terminal Angkutan Udara - Terminal Angkutan Air - Terminal Angkutan darat - Bangunan Keagamaan - Halte/Shelter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	646	Bangunan Peninggalan Sejarah - Monumen - Candi - Keraton - Rumah Tradisional - Heritage	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	647	Bangunan Industri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	648	Bangunan Tempat Tinggal - Rumah Perkotaan • Inti/Sederhana • Sedang/Mewah • Rumah Susun - Rumah Pedesaan • Rumah Contoh - Real Estate - Bapetarum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	649	Elemen Bangunan - Pondasi • Di atas tiang - Dinding • Penahan beban • Tidak menahan beban - Atap - Lantai/Langit-langit • Suspended • Solit - Pintu/Jendela • Pintu Harmonik • Pintu biasa • Pintu sorong • Pintu kayu • Jendela sorong - Jendela vertikal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

6	650 651	Tata Kota Daerah Perdagangan/ Pelabuhan - Daerah pusat perbelanjaan - Daerah perkotaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	652	Daerah Pemerintahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	653	Daerah Perumahan - Kepadatan rendah - Kepadatan tinggi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	654	Daerah Industri - Industri berat - Industri ringan - Industri rumah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	655	Daerah Rekreasi - Taman kota - Tempat olah raga dan bermain - Ruang terbuka	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	656	Transportasi - Jaringan jalan - Penerangan jalan - Jaringan kereta api - Jaringan sungai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	657	Assainering Saluran pengumpulan Instalasi pengolahan • Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		• Unit Desinfektan • Unit Perpompaan				
	658	Kesehatan Lingkungan - Persampahan • Bangunan pengumpul • Bangunan pemusnahan - Pengotoran Udara - Pengotoran Air • Air buangan industri - Kegaduhan/Polusi Suara - Kebersihan Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
7	660	Tata Lingkungan (Persampahan, Kebersihan Lingkungan, Pencemaran)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	661	Daerah Hutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	662	Daerah Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	663	Daerah Pemukiman	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	664	Pusat Pertumbuhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	665	Transportasi - Jaringan jalan - Jaringan kereta api - Jaringan sungai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8	670 671	Ketenagaan - Listrik • Kelistrikan PLN • Kelistrikan non PLN - Pembangkit tenaga listrik • PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) • PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) • PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) • PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) • PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) • PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) • PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) - Transmisi tenaga listrik • Gardu induk/gardu penghubung/gardu trafo • Saluran udara tegangan tinggi • Kabel bawah tanah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Distribusi tenaga listrik • Gardu distribusi • Tegangan rendah • Tegangan menengah • Jaringan bawah tanah - Pengusahaan listrik • Sambungan listrik • Penjualan tenaga listrik • Tarif Listrik				
	672	Tenaga Air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	673	Tenaga Minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	675	Tenaga Matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	676	Tenaga Nuklir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	677	Tenaga Panas Bumi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	678	Tenaga Uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi tugas	Bidang Teknis

	679	Tenaga Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
9	680	Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
10	690	Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi tugas	Bidang Teknis
	691	Air Minum Intake – Broncaptering – Sumur – Bendungan – Saringan – Pintu air – Saluran pembawa – Alat ukur – Perpompaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi tugas	Bidang Teknis
	692	Tranmisi Air Baku – Perpipaan – Katup Udara – Katup Penguras – Bak pelepas tekanan – Jembatan pipa – Syphon	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	693	Instalasi Pengelolaan – Bangunan Ukur – Bangunan Aerasi – Bangunan Pengendapan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Bangunan pembubuh bahan kimia - Bangunan pengaduk - Bangunan saringan - Perpompaan - Clear Hell				
	694	Distribusi - Reservoir Menara Bawah Tanah • Menara • Reservoir di bawah tanah - Perpipaan - Perpompaan - Jembatan Pipa - Syphon - Hydran • Hydran umum • Hydran kebakaran - Katup • Katup udara • Katup pelepas - Bak Pelepas Tekanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

VIII	PENGAWASAN					
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	700	PENGAWASAN - Monitoring,Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	701	- Bidang Urusan Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	702	- Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	703	- Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	704	- Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/Kearsipan/ Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	705	- Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	707	- Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	708	- Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	709	- Bidang Perjalanan Dinas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
2	710	BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	711	- Bidang Pemerintahan Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	712	- Bidang Pemerintahan Provinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	713	- Bidang Pemerintahan Kabupaten /Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	714	- Bidang Pemerintahan Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	715	- Bidang MPR / DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	716	- Bidang DPRD Provinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	717	- Bidang DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	718	- Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	719	- Bidang Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	720	BIDANG POLITIK				
	721	- Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	722	- Bidang Organisasi Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	723	- Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	724	- Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	725	- Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	726	- Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	727	- Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	731	- Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	732	- Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	733	- Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	734	- Bidang Keamanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	735	- Bidang Kejahatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	736	- Bidang Bencana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	737	- Bidang Kecelakaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

5	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	741	- Bidang Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	742	- Bidang Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	743	- Bidang Kebudayaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	744	- Bidang Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	745	- Bidang Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	746	- Bidang Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	747	- Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	748	- Bidang Media Masa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	750	BIDANG PEREKONOMIAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	751	- Bidang Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	752	- Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	753	- Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	754	- Bidang Pertambangan/ Kesamudraan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	755	- Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	756	- Bidang Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	757	- Bidang Permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	758	- Bidang Perbankan/ Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	759	- Bidang Agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	761	- Bidang Pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	762	- Bidang Jalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	763	- Bidang Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	764	- Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	765	- Bidang Tata Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	766	- Bidang Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	767	- Bidang Ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	768	- Bidang Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	769	- Bidang Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	780	BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	- Bidang Pengadaan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	782	- Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	783	- Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	784	- Bidang Kesejahteraan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	785	- Bidang Cuti	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	786	- Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	787	- Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	788	- Bidang Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	789	- Bidang Pendidikan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
9	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	- Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	792	- Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	793	- Bidang Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	794	- Bidang Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	795	- Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	796	- Bidang Pembinaan Kebendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	797	- Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	799	- Bidang Perbendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

IX.	KEPEGAWAIAN					
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	800	KEPEGAWAIAN				
		Klasifikasi Disini: Kebijaksanaan Kepegawaian - Perencanaan - Penelitian - Pengaduan - Tim - Statistik - Peraturan Perundang- Undangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
2	810	PENGADAAN				
	811	Lamaran - Testing - Screening - Panggilan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	812	Pengujian Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi	Bidang Teknis

					Perangkat Daerah/ unit kerja	
	813	Pengangkatan Calon Pegawai - Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I - Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II - Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III - Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV - Pengangkatan Calon Guru Inpres	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	814	Pengangkatan Tenaga Lepas - Pengangkatan Tenaga Bulanan / Tenaga Kontrak - Pengangkatan Tenaga Harian - Pengangkatan Tenaga Pensiunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
3	820	MUTASI Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tugas Belajar Dan Wajib Militer				
	821 821.1	Pengangkatan Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi tugas	Bidang Teknis

		- Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan I - Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan II - Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan III - Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan IV - Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara			Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	
	821.2	Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan - Sekjen/ Dirjen/ Irjen/ Kabag - Kepala Biro/ Direktorat/ Inspektur/ Kepala Pusat/ Sekretaris/ Kepala Dinas/ Asisten Sekwilda - Kepala Bagian/ Kepala Sub Direktorat/ Kepala Bidang/ Inspektur Pembantu - Kepala Sub bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/ Pemeriksa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

		- Residen/ Pembantu Gubernur - Wedana/ Pembantu Bupati - Camat - Lurah Administratif (Lurah Desa) - Jabatan Lainnya				
	822	Kenaikan Gaji Berkala - Pegawai Golongan I - Pegawai Golongan II - Pegawai Golongan III - Pegawai Golongan IV	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	823	Kenaikan Pangkat/ Pengangkatan - Pegawai Golongan I - Pegawai Golongan II - Pegawai Golongan III - Pegawai Golongan IV	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	824	Pemindahan/ Pelimpahan/ Perbantuan - Pegawai Golongan I - Pegawai Golongan II - Pegawai Golongan III - Pegawai Golongan IV - Lolos Butuh - Kurikulum dan Silabi - Proposal (TOR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	825	Datasering dan Penempatan Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	
	826	Penunjukan Tugas Belajar - Dalam Negeri - Luar Negeri - Tunjangan Belajar - Penempatan Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	827	Wajib Militer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	828	Mutasi Dengan Instansi Lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
4	830	KEDUDUKAN Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat				
	831	Perhitungan Masa Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

	832	Penyesuaian Pangkat / Gaji - Pegawai Golongan I - Pegawai Golongan II - Pegawai Golongan III - Pegawai Golongan IV	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	833	Penghargaan Ijazah / Penyesuaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	834	Jenjang Pangkat / Eselonering	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
5	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Permahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan Dispensasi				
	841	Tunjangan - Jabatan - Kehormatan - Kematian/ Uang Duka - Tunjangan Hari Raya - Perjalanan Dinas Tetap/ Cuti/ Pindah - Keluarga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

		- Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)				
	842	Dana - Taspen - Kesehatan - Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	843	Perawatan Kesehatan - Poliklinik - Perawatan Dokter - Obat-Obatan - Keluarga Berencana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	844	Koperasi/ Distribusi - Distribusi Pangan - Distribusi Sandang - Distribusi Papan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	845	Perumahan/Tanah - Perumahan Pegawai - Tanah Kapling - Losmen/Hotel	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	846	Bantuan Sosial - Bantuan Kebakaran - Bantuan Kebanjiran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

6	850	CUTI Meliputi: Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti melahirkan, Cuti di luar Tanggungan negara, Cuti Alasan penting/alasan lainnya				
	851	Cuti Tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	852	Cuti Besar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	853	Cuti Sakit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	854	Cuti Hamil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

	855	Cuti Naik Haji/Umroh	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	856	Cuti Di Luar Tangungan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	857	Cuti Alasan Lain/Alasan Penting	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
7	860	PENILAIAN Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian dinas, Penilaian kekayaan pribadi, dan Rehabilitasi				
	861	Penghargaan - Bintang/ Satyalencana - Kenaikan Pangkat Anumerta - Kenaikan Gaji Istimewa - Hadiah Berupa Uang - Pegawai Teladan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

	862	Hukuman - Teguran Peringatan - Penundaan Kenaikan Gaji - Penurunan Pangkat - Pemindahan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia Daerah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	863	Konduite, DP3, Disiplin Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	864	Ujian Dinas - Tingkat I - Tingkat II - Tingkat III	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	866	Rehabilitasi/ Pengaktifan Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

8	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah/Janji Dan Korps Pegawai				
	871	Formasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	872	Bezetting/ Daftar Urut Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	873	Registrasi - NIP - KARPEG - Legitiminasi/ Tanda Pengenal - Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	874	Daftar Riwayat Pekerjaan - Tanggal Lahir - Penggantian Nama - Izin Kepartaian Organisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

	875	Kewenangan Mutasi Pegawai - Pelimpahan Wewenang - Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	876	Penggajian - SKPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	877	Sumpah/Janji	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	878	Korps Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
9	880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI Melalui Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk Sementara				

		Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat				
	881	Permintaan Sendiri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	882	Dengan Hak Pensiun - Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan I - Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan II - Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan III - Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan IV - Pensiun Janda / Duda - Pensiun Yatim Piatu - Uang Muka Pensiun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	883	Karena Meninggal - Karena Meninggal Dalam Tugas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

	884	Alasan Lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	885	Uang Pesangon	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	886	Uang Tunggu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	887	Untuk Sementara Waktu	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
	888	Tidak Dengan Hormat	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia daerah Kabupaten Bangli	Bidang Teknis
10	890	PENDIDIKAN PEGAWAI Meliputi: Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan				

	891	Perencanaan - Program - Kurikulum dan Silabi - Proposal (TOR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	892	Pendidikan Reguler / Kader - IPDN / APDN - Kursus-Kursus Reguler	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	893	Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler - LEMHANAS - Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM - Kursus-Kursus / Penataran - Diklat Teknik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan - Diklat Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	894	Pendidikan Luar Negeri - Berkesinambungan/ Berkala/ Bergelar - Non Gelar/ Diploma	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

	895	Metode	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	896	Tenaga Pengajar/ Widyaiswara/ Narasumber - Moderator	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	897	Administrasi Pendidikan - Tahun Pelajaran - Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian - STTP - Penilaian Angka Kredit - Laporan Pendidikan Dan Pelatihan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
	898	Fasilitas Belajar - Tunjangan Belajar - Asrama - Uang Makan - Uang Transport - Uang Buku - Uang Ujian - Uang semester/ Uang Kuliah - Uang Saku	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis

	899	Sarana Pendidikan - Bantuan Sarana Belajar - Bantuan Alat-Alat Tulis - Bantuan Sarana Belajar Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja	Bidang Teknis
--	-----	--	----------	------------	--	---------------

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH

X.	KEUANGAN					
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	900	KEUANGAN				
1	901	Nota Keuangan - Berkas pengantar nota keuangan APBD perubahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	902	APBN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	903	APBD, RAPBD - Hibah - Bantuan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	904	APBN-P	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang

	905	Dana Alokasi Umum - Berkas pengajuan - Penyusunan DAU - Laporan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	906	Dana Alokasi Khusus - Berkas pengajuan - Penggunaan DAK - Laporan - Dana Bagi hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	907	Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana dari Pusat Ke Daerah)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	908	APBD-P	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	909	BLUD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
2	910	ANGGARAN				
	911	Belanja Tak Langsung/ Rutin - APBD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan Perda APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

912	Belanja Langsung/ Pembangunan - Pengusulan anggaran pembiayaan/kegiatan - Penggunaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
913	Anggaran Belanja Tambahan/ Anggaran Perubahan APBD - Mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
914	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Daftar Usulan Kegiatan (DUK) - Pengusulan Pra RKA - Pengusulan RKA - Pembahasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
915	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Daftar Usulan Proyek (DUP) - Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
916	Revisi Anggaran/ Penyempurnaan APBD - Pengusulan realisasi APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	917	Kode Rekening	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	918	Besaran Punia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
3	920	OTORISASI/SKO/Surat Penyediaan Dana (SPD)				
	921	Rutin/Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	922	Pembangunan/Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	923	Pendapatan/ DBT-CHT	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	924	Pembiayaan/ Honorium	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	925	SILPA	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	926	Ralat SPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	927	Pembukaan Rekening	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	928	Penutupan Rekening	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
4	930	VERIFIKASI				
	931	SPM Rutin (Daftar P8)/SPM Murni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	932	SPM Pembangunan (Daftar P8)/SPM Kegiatan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	933	Penerimaan (Daftar P6. P7)/ Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	934	SPJ Belanja Tidak Langsung/ SPJ Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	935	SPJ Belanja Langsung/ SPJ Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	938	SISDUR Belanja Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	939	Kelebihan/ Kekurangan Pembayaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
5	940	PEMBUKUAN/ AKUNTANSI				
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	942	Permintaan Data Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	943	Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	944	Laporan Fisik dan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	945	Laporan Posisi Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

6	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)/Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	953	Penghapusan Kekayaan Negara - Aset Daerah - Aset bergerak - Aset tidak bergerak - Aset tidak berwujud	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	954	Pengangkatan/ Penggantian Pemimpin Proyek/ PPTK dan Pengangkatan/ Pemberhentian Bendaharawan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	955	Spesimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	957	SP2D	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	958	SKPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	959	TU/ GU	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	963	Laporan Keuangan Bendaharawan - Laporan bulanan - Laporan tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	964	Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	965	Temuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	966	Rekonsialisasi Data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
8	970	PENDAPATAN - Pendapatan asli daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	972	Subsidi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH, PBB	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi tugas	Sekretariat, Bidang

	974	Retribusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	975	Bea	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi/tugas	Sekretariat, Bidang
	976	Cukai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	977	Pungutan/ PNPB	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	978	Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan Provinsi, Bantuan Pemerintah, dan Bantuan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	979	Bantuan Gubernur/ Hibah/ Bansos	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
9	980	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

10	990	BENDAHARAWAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	991	SKPP/SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	993	BKU	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	994	Berita Acara Hibah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	995	Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
--	-----	------------------------------	----------	------------	--	---------------------

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA